

EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Oleh:
RYAN WAHEDRI
NIM. E21111129

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email:ryanwahedri@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi terhadap perencanaan keputusan, evaluasi terhadap input pengambilan keputusan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendistribusi Raskin di Tanjung Hulu belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan tepat waktu dan data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Lurah di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak, Pegawai di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan diketahui bahwa dalam Ketercapaian tujuan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi program yang belum optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa sosialisasi program memang kurang merata karena akses masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program juga tidak mudah sebab masih banyak warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang program raskin masih rendah, mereka menganggap semua warga dapat menikmati bantuan tersebut, karena mayoritas masih hidup serba kekurangan. Kendala lainnya adalah tingkat kelancaran distribusi bantuan yang masih kurang akibat keterlambatan raskin dari kecamatan. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh akses jalan yang belum memadai. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar program raskin mendapat dukungan masyarakat luas. Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat memperoleh jatah beras Raskin.

Kata-kata Kunci : Evaluasi, Program Beras Miskin, Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak.

Abstract

This study aims to determine the evaluation of the planning decision, the evaluation of the decision-making input, evaluate the process, and evaluation of programs to help further decisions in Raskin program in Tanjung Hulu Pontianak. The problem in this research is the distributor Raskin in Tanjung Hulu has not been targeted, not the right amount and on time and data RTS from BPS data Raskin recipients are not the same. Research subjects in this study consisted of, Lurah in Tanjung Hulu Pontianak, Employees in Tanjung Hulu Kota Pontianak and Prominent Citizens in Tanjung Hulu Pontianak. The results obtained in the field study authors note that the program objectives Achievement Raskin in Tanjung Hulu is still not optimal. It is also triggered by a number of constraints. These constraints include the level of socialization is not optimal. Tanjung Hulu Village party recognizes that socialization is less prevalent for public access to follow socialization program is also not easy because there are still many people living in remote and difficult locations. Another constraint is the level of public awareness about the Raskin program is still low, they assume that all citizens could enjoy the aid, because the majority of surviving deprivation. Another constraint is the level of fluency distribusi aid is still lacking due to delays Raskin of the district. It was partly influenced by the access road is not adequate. Suggestions that can be

considered to be the Village Tanjung Hulu government improve coordination with many parties such as community leaders and the general public in order to program Raskin received broad public support. Still required data collection to the public in Tanjung Hulu Raskin recipients so that all poor families in Tanjung Hulu can obtain ration Raskin.

Keywords: Evaluation, rice for the poor program, village of Tanjung Hulu Pontianak.

A. PENDAHULUAN

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya, program Raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam perlindungan sosial. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan pemberasan mengintrukasikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang program Raskin adalah

1. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2003, tentang pendiri perusahaan umum BULOG.
2. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Permenkeu Tentang penunjukan kementerian sosial sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) program Raskin.

4. Permensos No. 24 Tahun 2013 tentang kesejateraan sosial kecamatan.

5. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

6. Surat Edaran Menteri dalam negeri No : 900/2634/SJ tahun 2013 tentang pengalokasikan biaya penyaluran Raskin dari titik Distribusi ke titik bagi.

Dalam Pedoman Umur Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Pedom Raskin) yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku penanggung Jawab program Raskin, penyalur Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah mulai sejak 1998 hingga sekarang sudah 17 tahun berjalan.

Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pangan rumah tangga terutama rumah

tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan lebih menjadi lebih cepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin tersebut.

Tujuan Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran, keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Penunjukan BOLOG untuk melaksanakan program ini antar lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia,

dan stok beras BULOK yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOK mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintahan. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin)

Khususnya di Kalimantan Barat Indikator Tingkat Kemiskinannya berjumlah pada bulan september 2015 sekitar 381.920 orang (8,07 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang berjumlah 401.510 orang (8,54 persen), berarti menurun sekitar 19.590 orang atau mengalami penurunan 0,47 persen.

Tabel 1
Data Jumlah Penerimaan raskin Kelurahan Tanjung Hulu Per Bulan

Tahun	Jumlah Baras (Ton)	Jumlah RTS
2012	684	684
2013	680	684
2014	680	595
2015	670	558

Sumber: Kelurahan Tanjung Hulu tahun 2016

Dari table 1 terlihat pada Tahun 2014 dengan verifikasi KK yang berhak dari BPS turun menjadi 558 RTM per KK. Dengan PAGU 570 ton per bulan. Jumlah yang diterima per KK adalah 15 Kg dengan harga Rp. 1.600 per kilogram.

Program Raskin diharapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima raskin, termasuk di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Tabel 2.

Data Jumlah Penerima Raskin Bulan Januari 2015 di Kelurahan Tanjung Hulu

RW	Jumlah RT		Jumlah yang diterima (Per RTS = 10 Kg)
I	6 RT	-	-
II	8 RT	74	1100 kg
III	11 RT	95	1300 kg
IV	9 RT	85	1100 kg
V	8 RT	56	1100 kg
VI	6 RT	-	-
VII	9 RT	22	1100 kg
VIII	7 RT	54	1100 kg
IX	7 RT	55	1100 kg
Total		441	7900 kg

Sumber: Kelurahan Tanjung Hulu

Bila diamati, data yang tertera dalam table 2 rata rata penerimaan beras per RTS sebanyak 17.91 Kg/bulan. Akan tetapi, pada kenyataan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat berdasarka hasil musyawarah warga, maka pendistribusian beras Raskin dengan prinsip bagi rata

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja, tanpa adanya pengawasan. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan tujuan dari kebijakan dicapai untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Keberhasilan dalam melakukan evaluasi kebijakan harus dilihat dalam perspektif sejauhmana pencapaian tujuan dari kebijakan itu berhasil dilaksanakan, bukan sebaliknya kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika mampu mengungkapkan kegagalan atau persoalan dari masing-masing tahapan kebijakan, tanpa sebuah petunjuk atau bahkan solusi yang obyektif.

Secara konseptual terkait dengan evaluasi kebijakan, dipaparkan oleh beberapa para ahli berikut, diantaranya :

1. William N. Dunn (dalam Tilaar, 2009:226) mengungkapkan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

2. James Anderson (dalam Rusli, 2013:118) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional adalah suatu kegiatan kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan dan para administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu.
3. Charles O. Jones (dalam Rusli, 2013:119) mengemukakan evaluasi... adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan-kegiatan pemilah-milah obyek, cara pengukuran dan metode analisa.
4. Dye (1981:336-337) mendefinisikan evaluasi kebijakan :*"policy evaluation is learning about the consequences of public policy"*
5. Wholey, 1979, dalam Dye, (1981) mendefinisikan evaluasi kebijakan lebih kompleks bahwa : *"Policy evaluation is the assessment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives, or assessment of the relative effectiveness of two or more program in meeting common objectives"*
6. Mustofadijaya (dalam Rusli, 2013:119) mengemukakan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan public, oleh karena itu evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas semua fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu.
7. Badjuri dan Teguh (2002:132) evaluasi kebijakan dilakukan "setidaknya untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya? untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana public terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan serta untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan public yang akan datang".

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat

membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan public yang ditentukan. evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan public diimplementasikan, dalam rangka menguji atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atau sesuatu fenomena. Fenomena yang dinilai berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrument kebijakan yang digunakan, response dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan sebagainya.

Evaluasi lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih kepada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Lebih lanjut Dunn, mengemukakan evaluasi kebijakan mencakup 3 tipe, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, yang menyangkut perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu
- c. Evaluasi kebijakan sistematis, melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Dan menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat digunakan sejumlah pendekatan yang berbeda untuk jenis kebijakan public yang sama. Atau sebaliknya pendekatannya sama tetapi kasus dan konteksnya berbeda. Dan itu dimungkinkan jika memang dianggap mampu mendekati sebuah

persoalan dengan cara yang lebih baik guna mengungkap sejumlah persoalan kebijakan yang dievaluasi. Beberapa pendekatan yang biasa digunakan diantaranya pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi.

Menurut Dunn dalam Rusli (2013:121-122) pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi terbagi atas 6 indikator, yaitu :

1. Efektivitas

Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

2. Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

3. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah

Penilaian terhadap *adequacy* ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

4. Equity/pemerataan

Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

5. Responsiveness

Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

6. Appropriateness/ketepatangunaan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Selanjutnya Dunn dalam Tilaar dan Riant (2009:227-228) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi semu, yaitu pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang

valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan *tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut kepada target kebijakan*. Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri atau *self evident atau tidak controversial*.

2. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut *atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan*. Evaluasi formal berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai adalah tujuan dan target yang diumumkan secara formal.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang

secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam.

Sebagai pembanding Lester dan Steward dalam Tilaar dan Riant (2009:229-231) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi :

1. Evaluasi terhadap perencanaan keputusan,
2. Evaluasi terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur
3. Evaluasi proses, yaitu evaluasi berkenaan dengan proses implementasi.
4. Evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program raskin

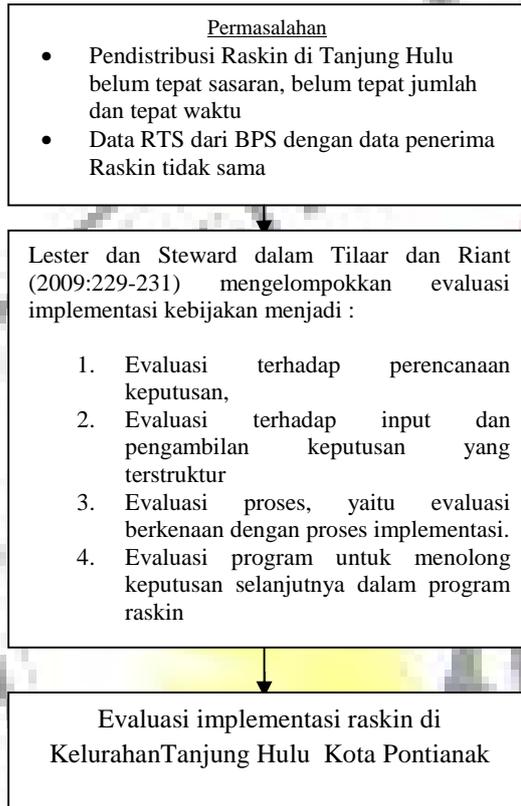
Demikian pula hal yang sama atau tidak jauh berbeda Bingham dan Felbinger dan Lester dan Steward, membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi dari sesuatu
2. Evaluasi dampak, yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan

tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan

4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Lurah di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak
- b. Pegawai di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak
- c. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pontianak menjadi salah satu sasaran program Raskin. Sebagai gambaran, Kepala Divisi regional Bulog Kalbar, Muhammad Attar Rizal, mengemukakan pada berbagai awak media bahwa sebanyak 15.271 rumah tangga sasaran sebagai penerima beras miskin di Kota Pontianak tahun 2016, angka ini sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat, data penerima Raskin tahun 2016 untuk Kota Pontianak masih menggunakan data

tahun sebelumnya. Demikian pula mekanismenya tidak banyak mengalami perubahan. Masing-masing RTS diberikan jatah sebanyak 15 kilogram/bulan atau sebanyak 229,06 ton/bulan dan sebanyak 2.748,78 ton/tahun khusus di Kota Pontianak dengan harga tebus senilai Rp1.600 /kilogram di titik distribusi.

Raskin yang didistribusikan merupakan beras medium, namun demikian, Bulog siap mengganti apabila Raskin yang diterima RTS kualitasnya tidak baik dalam kurun waktu 3 x 24 jam. Pendistribusian mulai dari gudang Bulog hingga ke titik distribusi butuh waktu untuk menyampaikannya kepada RTS. Untuk itu, pihak Bulog mengimbau selama Raskin berada di tempat penyimpanan sementara, hendaknya diperhatikan ruangnya. Sebab beras memiliki karakteristik tersendiri dimana ruangan yang lembab atau basah bisa mempengaruhi kualitas beras. Juga kemungkinan terjadi dalam perjalanan dari gudang ke titik distribusi, sehingga diharapkan dilakukan pengecekan dulu begitu sampai di titik distribusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria, kami siap menggantinya. Agar sirkulasi Raskin lancar dan tidak terhambat, Pemkot Pontianak menyiapkan dana talangan sehingga keterlambatan pembayaran oleh RTS penerima raskin tidak menjadi hambatan untuk sirkulasi berikutnya.

Saat ini pemerintah telah memiliki beragam program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Tanjung Hulu. Guna memaksimalkan program-program tersebut maka diperlukan kajian pada program yang dianggap perlu dilakukan kajian. Salah satu program yang dianggap perlu untuk dilakukan kajian di dalamnya adalah program Raskin (Beras Miskin). Program tersebut sudah sejak lama memiliki banyak hambatan baik secara teknis pembagian maupun kebocoran-kebocoran aliran bantuan beras Raskin dalam proses penyalurannya.

Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK per bulan netto dengan harga netto Rp. 1600 per Kg di titik distribusi. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berpijak pada hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program raskin di wilayah Kelurahan Tanjung Hulu.

Evaluasi terhadap perencanaan keputusan, penentuan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan perumusan tujuan program raskin

Perencanaan keputusan sasaran program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dilakukan melalui rapat koordinasi antara pihak kelurahan, tokoh masyarakat dan warga setempat. Atas usulan masyarakat akhirnya disepakati bahwa raskin dibagikan secara lebih merata meskipun hal ini menyalahi aturan. Karena penerima program lebih dari ketentuan BPS, akhirnya tiap penerima program Raskin hanya mendapat jatah lima kilogram. Akan tetapi, penerima raskin yang merasa kurang membutuhkan bantuan tersebut dihimbau untuk memberikan jatahnya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Keputusan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik akibat kecemburuan sosial.

Evaluasi terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur

Evaluasi terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur menolong pihak pelaksana program dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan dan bagaimana

prosedur kerja untuk mencapainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin. Pihak RT yang mengirim undangan ke rumah, dan warga bisa mengambil beras ke rumah RT dan waktunya juga fleksibel sehingga warga tak perlu antri. Tugas aparat kelurahan juga menjadi lebih ringan dengan berkoordinasi dengan pihak RT dan warga juga senang karena mereka tak perlu jauh-jauh datang ke kantor kelurahan.

Evaluasi terhadap proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan dalam pembagian raskin

Evaluasi terhadap proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan dalam pembagian raskin meliputi sampai sejauh mana rencana telah diterapkan. Pembagian raskin di Kelurahan Tanjung Hulu sudah sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distribusi raskin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus

penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi.

Evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program raskin

Ketercapaian tujuan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi program yang belum optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa sosialisasi program memang kurang merata karena akses masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program juga tidak mudah sebab masih banyak warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang program raskin masih rendah. Mereka menganggap semua warga dapat menikmati bantuan tersebut, karena mayoritas masih hidup serba kekurangan. Kendala lainnya adalah tingkat kelancaran distribusi bantuan yang masih kurang akibat keterlambatan raskin dari kecamatan. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh akses jalan yang belum memadai.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Perencanaan keputusan sasaran program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dilakukan melalui rapat koordinasi antara pihak kelurahan, tokoh masyarakat dan warga setempat. Atas usulan masyarakat akhirnya disepakati bahwa raskin dibagikan secara lebih merata meskipun hal ini menyalahi aturan. Karena penerima program lebih dari ketentuan BPS, akhirnya tiap penerima program Raskin hanya mendapat jatah lima Kg per kepala keluarga.
2. Evaluasi terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur menolong pihak pelaksana program dalam mengatur keputusan, pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu menunjukkan bahwa pembagian raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin.

3. Evaluasi terhadap proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan dalam pembagian raskin meliputi sampai sejauh mana rencana telah diterapkan. Pembagian raskin di Kelurahan Tanjung Hulu sudah sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distribusi raskin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi.
4. Ketercapaian tujuan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi program yang belum optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa sosialisasi program memang kurang merata karena akses masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program juga tidak mudah sebab masih banyak warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar program raskin mendapat dukungan masyarakat luas.
2. Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat memperoleh jatah beras Raskin.
3. kegiatan program Raskin sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif seperti; rapat kordinasi, media masa, dan media lainya yang dapat menjangkau masyarakat untuk informasi-informasi tentang Raskin.
4. Diharapkan untuk waktu yang akan datang kualitas beras pembagian Raskin memenuhi standar kualitas beras yang baik program Raskin pemerintah mempunyai harapan dapat membantu semua Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan pangannya (beras).

G. REFERENSI

Dunn, William N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*.: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi,Hadari.2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho . 2011. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT.Elex Media Komputindo: Jakarta

Putra, Fadilah, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*.: Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.Yogyakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H.A.R and Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RYAN WAHEDRI
NIM / Periode lulus : E21111129 / II 2016/2017
Tanggal Lulus : 11 November 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (PPAPK)
E-mail address/ HP : ryanwahedri@yahoo.co.id / 0852 4557 1027

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika** pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG HULU
KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Pardi, S.Sos., M.AB
NIP. 19720903 200212 100 3

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 2 Desember 2016

RYAN WAHEDRI
NIM. E21111129

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)